



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Taliwang

Pada tanggal 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

DENNY SAPUTRA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Faridah Anwar

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Tim Kerja Zona Integritas	a. Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas/Penanggungjawab Zona Interitas pada KPU Kabupaten Sumbawa Barat;														
		b. Pelaksanaan tugas sesuai Rencana Kerja Tim Kerja Zona Integritas/Penanggungjawab Zona Integritas;														
		c. Evaluasi dan tindak lanjut atas pelaksanaan rencana kerja Tim Zona Integritas/Penanggung jawab Zona Integritas.														
2	Road Map Pembangunan Zona Integritas	a. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja;														
		b. Sosialisasi/Internalisasi road map/Rencana Kerja Zona Integritas unit kerja kepada anggota organisasi;														

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		c. Penyajian Rencana Kerja Zona Interitas sesuai prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab dan telah diformalkan serta selaras dengan Road Map.													
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	a. Pelaksanaan PMPRB oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;													
		b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB;													
		c. Penyampaian Rencana aksi tindak lanjut (RATL) dan hasil RATL dilaksanakan;													
		d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja oleh Penanggungjawab ZI internal unit kerja.													
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b. Pembentukan <i>agent of change</i> ataupun role model untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan.													
5	Harmonisasi	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron /bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus.													
		b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat.													
6	Peran Kebijakan	a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya.													
		b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit; jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi.													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	Evaluasi	Monitoring dan Evaluasi Target dan Pencapaian Kinerja														
8	dan Prosedur Operasional tetap (SOP)	Penerapan Prosedur operasional tetap (SOP)														
9	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.														
		b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu endorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.														
10	Keterbukaan informasi publik	a. Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik;														
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.														
11	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	a. Perhitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan unit kerja;														
		b. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja														
		c. Pelaksaannya analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama.														

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	a. Identifikasi kebutuhan kompetensi														
		b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan														
13	Penetapan Kinerja Individu	a. Penerapan penetapan kinerja individu														
		b. Penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi														
		c. Pengukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya.														
		d. Pelaksanaan pengukuran kinerja individu secara periodik														
		e. Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu														
		f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya.														
14	Penegakan aturan disiplin /kode etik/kode perilaku	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan dan diimplementasikan.														
		b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode														

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	Pelaksanaan evaluasi jabatan	a. Implementasi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai													
		b. Pelaksanaan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ yang memberikan dampak pengembangan SDM													
16	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai													
17	Keterlibatan pimpinan	a. Keterlibatan pimpinan unit kerja secara langsung pada saat penyusunan RENSTRA													
		b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja													
		c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala													
		d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah													
		e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala													
18	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	a. Usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja													
		b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala													
19	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien													
20	Pemanfaatan aplikasi Akuntabilitas Kinerja	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran													
21	Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i>	Hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja													
22	Kerangka Logis kinerja	Terdapat Peta Strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai													
23	Gratifikasi	a. Pelaksanaan <i>public campaign</i> secara berkala													
		b. Implementasi penanganan gratifikasi													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		c. Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi													
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi													
24	Penerapan SPIP	a. Identifikasi lingkungan pengendalian													
		b. Pelaksanaan penilaian risiko unit kerja													
		c. Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi													
		d. Penyampaian informasi dan komunikasi tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada seluruh pihak terkait.													
		e. Pemantauan pengendalian intern													
		f. Evaluasi dan Penerapan SPI pada unit kerja													
25	Pengaduan Masyarakat	a. Tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat													
		b. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													
		c. Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
26	<i>Whistle Blowing System</i>	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i> ke seluruh pegawai													
27	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh pegawai													
		b. Implementasi penanganan Benturan Kepentingan													
		c. Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan													
		d. Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan													
28	Pembangunan Zona Integritas	a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas level unit kerja dengan penandatanganan pakta integritas													
		b. Pembangunan zona integritas secara intensif													
		c. Evaluasi atas pembangunan zona integritas secara berkala													
29	Standar Pelayanan	a. Penetapan kebijakan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		b. Publikasi standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website.													
		c. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dengan melibatkan stakeholders (antara lain: tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat.													
30	Budaya Pelayanan Prima	a. Usaha peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima melalui pelatihan/sosialisasi kepada seluruh pegawai.													
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses secara online melalui berbagai media (website/media sosial).													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		c. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi pegawai yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan dan diterapkan ke seluruh pegawai.													
		d. Sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar.													
		e. Sarana layanan terpadu/terintegritas dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras.													
		f. Inovasi pelayanan yang mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain.													
31	Pengelolaan Pengaduan	a. Media pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		b. Unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan													
		c. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan													
		d. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi													

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Penilaian kepuasan terhadap	a. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan													
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka													
		c. Tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat													

Taliwang, 2 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumbawa Barat

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

